

BAB III

BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

3.1. Monografi Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar $0^{\circ}27'12''\text{S}$ $100^{\circ}35'38''\text{E}$. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. (Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04)

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar $0^{\circ}27'12''\text{S}$ $100^{\circ}35'38''\text{E}$. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. (Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04)

Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu bersurat terutama peninggalan zaman Adityawarman.

a.) Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada $00^{\circ}17''\text{LS}$ - $00^{\circ}39''\text{LS}$ dan $100^{\circ}19''\text{BT}$ - $100^{\circ}51''\text{BT}$ [3] . Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut.

b.) Batas Wilayah

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu:

1. Utara berbatas dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Timur berbatas dengan Kabupaten Sijunjung
3. Selatan berbatas dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok
4. Barat berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman

c.) Topografi

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak. Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar
2. Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar
3. Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar
4. Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar

d. Iklim

Secara umum iklim di kawasan Kabupaten Tanah Datar adalah sedang dengan temperatur antara 12 °C–25 °C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan.

e. Hidrologi

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 buah sungai.

F.) Pemerintahan

1. Daftar Bupati Kabupaten Tanah Datar

Berikut ini rangkuman daftar nama Bupati Tanah Datar mulai periode tahun 1945 hingga sekarang:

Tabel 3.1.

Daftar Bupati Kabupaten Tanah Datar

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Keterangan
1.	Drs Sidi Bakarudin, S.H	1945	1950	
2.	Ibrahim Dt Pamuncak	1950	1958	
3.	Soetoro	1958	1960	
4.	Brigjen Mahyudin Al Gamar	1960	1974	14 Tahun
5.	Sulaiman Zulhudi	1980	1985	
6.	H. Muhammad Nalis	1980	1985	
7	Ikasuma Hamid	1985	1995	
8.	Masdar Saisa	1995	2000	
9.	Masriadi Martunus	2000	2005	
10	Muhammad Shaddiq Pasadiqoe	2005	2015	
11	Sudirman Gani	2015	2016	
12	Irdinansyah Tarmizi	2016	2020	
13	Zuldafri Darma	2020	2021	
14	Eka Putra	2021	Sekarang	

Sumber : Website Kabupaten Tanah Datar, Diakses Pada 29
Desember Pukul 20.07

Dari rangkuman di atas terlihat bahwasanya Bupati (ataupun penjabat Bupati) Tanah Datar keseluruhan masih didominasi oleh laki-laki dan belum pernah ada Bupati dari kalangan perempuan.

2. Kecamatan

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Indonesia. Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 kecamatan dan 75 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.336,10 km² dan penduduk 366.136 jiwa (2017) dengan sebaran 274 jiwa/km² Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanah Datar, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Daftar Kecamatan, Kelurahan di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Nagari
1.	Kecamatan Tanjuang Baru	Nagari Tanjuang Alam Nagari Barulah
2.	Kecamatan Salimpauang	Nagari Tabek Patah Nagari Sumaniak Nagari Salimpauang Nagari Supayang
3.	Kecamatan Sungai Tarab	Nagari Talang Tangah Nagari Simpuruik Nagari Padang Laweh Nagari Koto Baru Nagari Kumango Nagari Rao-Rao Nagari Pasie Laweh Nagari Koto Tuo Nagari Gurun Nagari Sungai Tarab
4.	Kecamatan Sungayang	Nagari Andaleh Baruh Bukik Nagari Tanjung Nagari Sungayang

		Nagari Sungai Patai Nagari Minangkabau
5.	Kecamatan Lintau Buo Utara	Nagari Tepi Selo Nagari Lubuk Jantan Nagari Tanjung Bonai Nagari Balai Tengah Nagari Batu Bulek
6.	Kecamatan Lintau Buo	Nagari Tigo Jangko Nagari Pangian Nagari Buo Nagari Taluak
7.	Kecamatan Padang Gantiang	Nagari Padang Ganting Nagari Atar
8.	Kecamatan Tanjung Emas	Nagari Koto Tengah Nagari Tanjung Barulak Nagari Saruaso Nagari Pagaruyung
9.	Kecamatan Rambatan	Nagari Balimbing Nagari III Koto Nagari Rambatan Nagari Simawang Nagari Padang Magek
10	Kecamatan Lima Kaum	Nagari Labuh Nagari Parambahan Nagari Baringin Nagari Cubadak Nagari Lima Kaum
11	Kecamatan Pariangan	Nagari Batu Basa Nagari Tabek Nagari Pariangan Nagari Simabur Nagari Sungai Jambu Nagari Sawah Tengah
12	Kecamatan Batipuh Selatan	Nagari Padang Laweh Malalo

		Nagari Batu Taba Nagari Guguk Malalo Nagari Sumpur
13	Kecamatan Batipuh	Nagari Bungo Tanjung Nagari Tanjung Barulak Nagari Pitalah Nagari Batipuah Baruah Nagari Batipuah Ateh Nagari Sabu Nagari Andaleh Nagari Gunung Rajo
14	Kecamatan X Koto	Nagari Koto Laweh Nagari Koto Baru Nagari Jaho Nagari Tambangan Nagari Aie Angek Nagari Panyalaian Nagari Pandai Sikek Nagari Paninjauan Nagari Singgalang

(Sumber : Web Kabupaten Tanah Datar diakses Pada Tanggal 29 Desember 2025 Pukul 20.34)

G. Infrastruktur

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pertanian, hal ini terlihat dari dominasi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Lokasi pertanian tersebar merata di seluruh wilayah dan produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membutuhkan jaringan jalan sebagai pendukung aktivitas sektor pertanian tersebut mulai dari kegiatan produksi, pascapanen dan pemasaran. Sementara itu kondisi jaringan jalan yang ada belum dapat mendukung sepenuhnya aktivitas pertanian tersebut, hal ini terlihat dari masih banyaknya ruas jalan yang lebarnya belum memenuhi syarat, kondisi permukaan jalan yang rusak dan masih banyak ruas jalan yang melalui lokasi

pertanian belum dapat dilalui kendaraan roda dua sekalipun, dengan mengatasi penanganan jaringan jalan ini, maka tentunya aktivitas sektor pertanian akan lebih ekonomis sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan sekaligus akan meningkatkan pengembangan wilayah dari Kabupaten Tanah Datar itu sendiri.

Pada saat ini pembangunan jalan di Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya hanya berupa memperbaiki kualitas jalan, sementara pembukaan jalan baru dipandang masih belum memungkinkan karena terkendala oleh keterbatasan dana. Selama tahun 2007 jumlah jembatan di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 238 buah dengan panjang 2.019,60 km. Jumlah jembatan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjung Emas sebanyak 33 buah dengan panjang 383,20 km

H. Ekonomi

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil atau agro industri. Masyarakat Tanah Datar juga dikenal gemar menabung dengan total dana tabungan masyarakat sebesar Rp223 miliar tahun 2004.

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu: Sangat Potensial, Potensial, dan Tidak Potensial. Untuk sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ubi kayu, kubis, karet, tebu, peternakan sapi potong, peternakan kuda, peternakan kambing potong, budidaya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik, dan budidaya ikan air tawar. Sektor lain yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri konstruksi bangunan sipil, pedagang eceran makanan olahan hasil bumi, usaha warung telekomunikasi, pedagang cenderamata, dan wisata sejarah. Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk hampir semua sektor pertanian kecuali cengkih, tembakau, bayam, dan merica. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang potensial

dikembangkan adalah galian kapur dan sirtu.

3.2. Profil Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tanah Datar

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan daerah di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Berlokasi di Jalan Lareh Nan Panjang No. 103, Batusangkar, Bawaslu Tanah Datar berperan penting dalam menjamin proses demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan transparan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. (“Web Bawaslu Tanah Datar” 2025)

Sebagai perpanjangan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Tanah Datar mengemban amanah untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, Pilkada, dan berbagai tahapan politik lainnya di daerah, termasuk pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit), masa tenang kampanye, serta netralitas penyelenggara dan aparatur negara. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Tanah Datar berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, media, dan unsur masyarakat lain untuk menciptakan pemilu yang kredibel dan bermartabat (“Web Bawaslu Tanah Datar” 2025)

Bawaslu Tanah Datar juga aktif mengadakan kegiatan penguatan dan pembekalan terhadap pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan nagari guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan partisipatif. Dalam proses pengawasan, lembaga ini tidak hanya fokus pada pencegahan pelanggaran tetapi juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu seperti netralitas ASN, pemasangan alat peraga, politik uang, dan sengketa pemilihan. (“Web Bawaslu Tanah Datar” 2025)

Melalui moto “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”, Bawaslu Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam menjaga marwah demokrasi di daerah serta mendorong peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Dukungan berbagai pihak dan kolaborasi yang sinergis menjadi landasan kuat bagi Bawaslu Tanah Datar untuk terus meningkatkan kualitas

pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tanah Datar agar setiap suara rakyat benar-benar bermakna dan terjamin keadilannya. ("Web Bawaslu Tanah Datar" 2025)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berlandaskan prinsip independensi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam setiap kegiatan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Struktur kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar didukung oleh unsur pimpinan, sekretariat, serta jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga nagari. Keberadaan pengawas di berbagai tingkatan memperkuat jangkauan pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis, koordinasi, dan evaluasi kinerja.

Kepemimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Ketua Andre Azki yang bertanggung jawab atas koordinasi seluruh fungsi pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Kedudukan Andre Azki sebagai ketua menghasilkan arah kebijakan pengawasan yang tegas dan terukur dalam setiap tahapan proses demokrasi. Zulman Hendrizal menjabat sebagai salah satu Anggota Bawaslu Tanah Datar, berperan aktif dalam penanganan pengaduan pelanggaran serta analisis faktual terhadap temuan lapangan. Al Azhar Rasyidin juga merupakan Anggota Bawaslu Tanah Datar yang fokus pada pengawasan netralitas peserta pemilu dan pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kecamatan dan nagari. Ketiga pejabat ini bersama sekretariat pelaksana membentuk tim pengawas yang profesional dalam menjamin integritas proses pemilu di daerah ("Web Bawaslu Tanah Datar" 2025)

Pembagian tugas di antara pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mencerminkan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan kelembagaan. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap kebijakan pengawasan dan penanganan pelanggaran diputuskan melalui musyawarah

pimpinan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik lokal. Pola kerja kolektif ini memperkuat legitimasi keputusan Bawaslu serta meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan

Pola kerja kolektif kolegial tersebut mendorong terciptanya keseimbangan kewenangan di antara pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Setiap anggota memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan pandangan dan pertimbangan hukum sebelum suatu keputusan ditetapkan. Kondisi tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan

Berikut di bawah ini Struktur Lengkap Bawaslu Tanah Datar yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Struktur Kepengurusan Bawaslu Tanah Datar



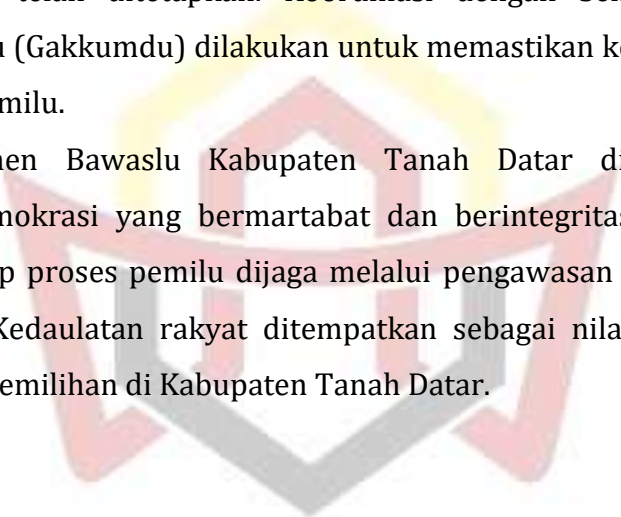
(Sumber: Bawaslu.co.id)

Pelaksanaan fungsi pengawasan didukung oleh sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang berperan dalam aspek administrasi, keuangan, dan dukungan teknis kelembagaan. Sinergi antara pimpinan dan sekretariat menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran operasional pengawasan pemilu. Keberadaan sekretariat memungkinkan pimpinan Bawaslu fokus

pada fungsi substantif pengawasan serta pencegahan. Upaya pencegahan pelanggaran pemilu menjadi fokus penting dalam strategi pengawasan. Sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Kesadaran kolektif masyarakat diharapkan tumbuh agar pengawasan pemilu dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

Penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan secara objektif dan profesional sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dugaan pelanggaran administratif, etik, maupun tindak pidana pemilu ditindaklanjuti melalui prosedur yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan pemilu.

Komitmen Bawaslu Kabupaten Tanah Datar diarahkan pada penguatan demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. Kepercayaan publik terhadap proses pemilu dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terbuka. Kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai nilai utama dalam setiap proses pemilihan di Kabupaten Tanah Datar.



UIN IMAM BONJOL
PADANG